

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN  
TAHUN 2025 - 2029**



**KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAPAN  
2025**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2025-2029 serta berpedoman pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesisir Selatan periode 2025-2029.

Tersusunnya dokumen rencana strategis ini diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan di wilayah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada rencana strategis.

Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh Tim Penyusun serta para Pemangku Kepentingan stake holder yang telah memberikan berbagai masukan terutama isu-isu strategis, baik secara langsung pada saat rapat pembahasan/dialog maupun secara tidak langsung melalui pemberitaan mass media untuk terwujudnya Renstra ini. Sesungguhnya disadari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis relatif cepat perkembangannya, oleh karena itu maka Renstra ini juga bersifat fleksibel, artinya sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan seiring dengan perkembangan Iptek dan lingkungan strategis dimaksud.

Mudah-mudahan dengan adanya Renstra ini sebagai pedoman, acuan atau rujukan dalam pelaksanaannya dapat membawa hasil positif di bidang administrasi pemerintahan umum khususnya dalam menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.

Tapan, 2025  
CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,



**SYAMVIL,S.STP.MM**

NIP. 19820113 200112 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>		<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>		<b>Ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>		<b>Iii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
	1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>7</b>
	2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	8
	2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	8
	2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	15
	2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	17
	2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	21
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ....	22
	2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah....	22
	2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	23
	2.2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	26
	2.2.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis .....	27
	2.2.5 Isu Strategis .....	27
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..</b>	<b>28</b>
	3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2025-2029.....	28
	3.2 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 .....	31
	3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029....	31
<b>BAB IV</b>	<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>33</b>
	4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	33
	4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	40
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>47</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Wilayah Administrasi dan Jumlah Kampung di Nagari Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	9
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Nagari dan Jenis Kelamin di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2025 .....	9
Tabel 2.3	Komposisi SDM-PNS Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025 .....	16
Tabel 2.4	Komposisi SDM-PNS Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Berdasarkan Golongan .....	16
Tabel 2.5	Kekayaan/Asset Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan .....	17
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 .....	19
Tabel 2.7	Anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029	17
Tabel 2.8	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	22
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.....	28
Tabel 3.2	Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.....	28
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.....	29
Tabel 3.4	Matrik Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2025-2029	30
Tabel 3.5	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan.....	32
Tabel 4.1	Rencana program kegiatan, indikator, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif kecamatan Basa Ampek Balai Tapan kabupaten Pesisir selatan.....	34
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.....	45

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah .

Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkatdaerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pada tahap penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan ranwal RPJMD yang



mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam ranwal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja perangkat daerah dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan perangkat daerah serta program dan pagu indikatif dalam ranwal RPJMD.

Selanjutnya pada tahap perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan perda tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang RPJMD.

Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 mengacu pada visi, misi dan program Bupati Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sangat penting bagi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, maka penyusunan Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk

menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 berisi visi, misi, tujuan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan 2025-2029 mengacu kepada beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung, dan Pasaman Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Rencana Strategis ini dibuat sebagai tindak lanjut dalam menyikapi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

### 1.3.2 Tujuan

- a. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pemerintah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.
- d. Menjadi dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan (Renja) setiap tahun, sehingga perencanaan tahunan memiliki dasar strategis yang kuat.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029 sebagai berikut :

#### BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### BAB II Gambaran Umum Pelayanan, Permasalahan, dan isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strtegis Perangkat Daerah
  - 2.2.1 Permasalahan



### 2.2.2 Isu Strategis

## BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### 3.2 Strategis dan Arah Kebijakan

#### 3.2.1 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

#### 3.2.2 Arah Kebijakan Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029

## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

#### 4.1.1 Program Pro Rakyat

### 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

#### 4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD)

#### 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

## BAB V PENUTUP

## BAB II

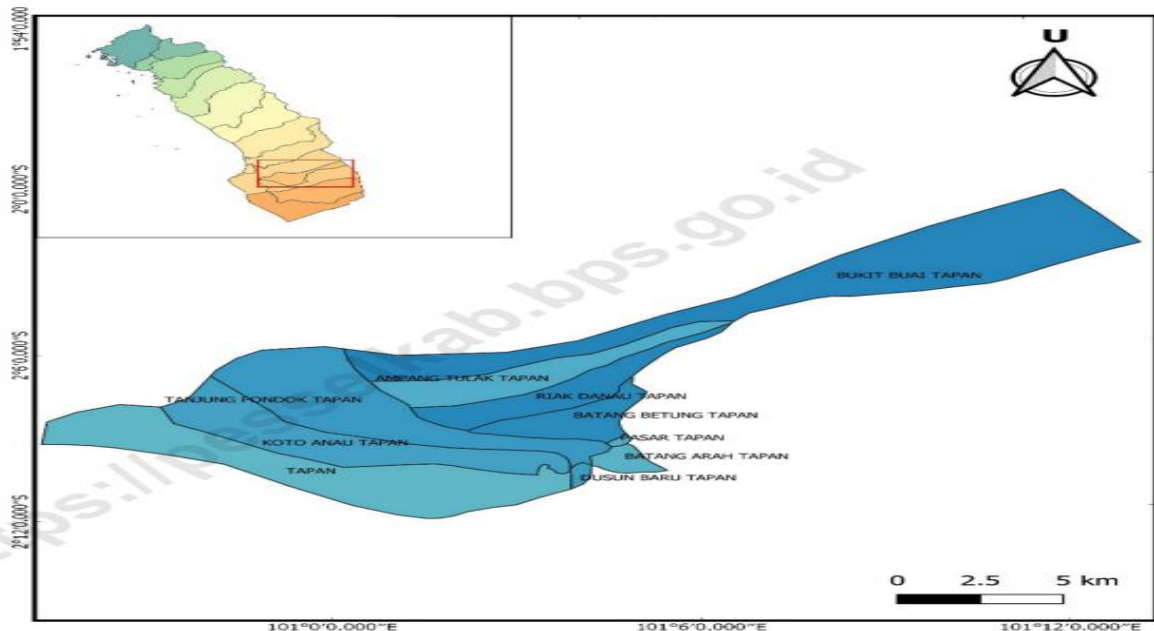
### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan data pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dalam angka (2022), secara geografis, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan memiliki luas wilayah 187,46 Km<sup>2</sup>. Jarak dari Pusat Ibu Kota Kabupaten Pesisir Selatan ± 140 Km yang di hubungkan oleh jalan Kabupaten dengan batas-batas Wilayah Kecamatan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan Kecamatan Pancung Soal
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kerinci
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pancung Soal
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

#### Peta Administrasi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan



Berdasarkan wilayah administratif, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 10 Nagari dan 20 kampung, Nagari terluasnya adalah Nagari Bukit Buai Tapan Sedangkan Nagari dengan luas terkecil adalah Nagari Pasar Tapan. Secara rinci jumlah nagari dan kampung pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Wilayah Administrasi dan Jumlah Kampung di Nagari**  
**Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Nagari	Jumlah Kampung
1	Bukit Buai Tapan	2
2	Ampang Tulak Tapan	2
3	Riak Danau Tapan	2
4	Batang Betung Tapan	2
5	Pasar Tapan	2
6	Batang Arah Tapan	2
7	Tanjung Pondok Tapan	2
8	Kota Anau Tapan	2
9	Tapan	2
10	Dusun Barau Tapan	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>20</b>

Sumber : Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Dalam Angka, 2022

Berdasarkan kondisi demografis Penduduk Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 berjumlah 16.061 orang yang terdiri dari 8,029 orang laki-laki dan 8,032 orang perempuan. Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan per Kecamatan dapat dilihat dari gambar dan tabel berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Nagari dan Jenis Kelamin**  
**di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2025**

No	Nagari	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	2	3	4	5=(3+4)	6
1	Bukit Buai Tapan	641	637	1.278	7,96
2	Ampang Tulak Tapan	619	629	1.248	7,77
3	Riak Danau Tapan	636	658	1.298	8,06
4	Batang Betung Tapan	1.122	1.097	2.219	13,82
5	Pasar Tapan	781	768	1.549	9,64
6	Batang Arah Tapan	1.229	1.219	2.448	15,24
7	Tanjung Pondok Tapan	1.073	1.094	2.167	13,49
8	Kota Anau Tapan	698	727	1.425	8,87
9	Tapan	673	623	1.296	8,07
10	Dusun Baru Tapan	557	580	1.137	7,08
	<b>Jumlah</b>	<b>8.029</b>	<b>8.032</b>	<b>16.061</b>	<b>100</b>

Sumber : Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Dalam Angka, 2022

Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan terdiri dari Rumah Sakit sebanyak 1 (satu) unit, Puskesmas sebanyak 1 (satu) unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 1 (satu) unit, Puskesmas sebanyak 9 (sembilan) unit, Posyandu sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit.

### 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

#### Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, diatur bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati, rincian tugas Kecamatan dalam Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

Jabatan	: CAMAT
Eselon	: III a
Unit	: KECAMATAN DALAM KABUPATEN
Organisasi	PESISIR SELATAN
Tugas Pokok	Camat mempunyai tugas pokok melaksana urusan dan tugas pembantuan di Kecamatan
Fungsi	: a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum; b. mengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; d. Mengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati; e. Pengoordinasian pemeliharaan

prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan nagari; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

- Uraian Tugas :
- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari;
  - h. Melaksanakan menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan, lima tahunan kecamatan sesuai dengan Program Pembangunan;
  - i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Kecamatan kepada Bupati;
  - j. Mengkoordinasikan Sekretaris Kecamatan, para kepala seksi dan

Subbag serta staf agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- k. Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada Sekretaris Kecamatan, para kepala seksi secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahannya; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Jabatan : SEKRETARIS

Eselon : III.b

Unit Organisasi : KECAMATAN DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tugas Pokok : Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

- Fungsi :
- a. Pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
  - c. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah urusan Umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan Pelaporan;
  - d. Penyelenggaraan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan Umum, kepegawaian, Pelaporan, Keuangan dan Perencanaan;
  - e. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi

- dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
- f. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah Kecamatan dan pengaduan/nagari;
- g. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- h. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Terpadu Kecamatan (PATEN); dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

- Uraian Tugas : a. Mengkoordinir bawahan dalam pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan Umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja Kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- f. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretaris serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis

- kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga;
  - h. Mengkoordinir urusan perlengkapan Rumah tangga dan Barang Inventaris Kecamatan;
  - i. Membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Kepala Seksi;
  - j. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - k. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan; dan
  - l. Mengkoordinir penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Pasal 2 Ayat 2 bahwa Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi aspek:

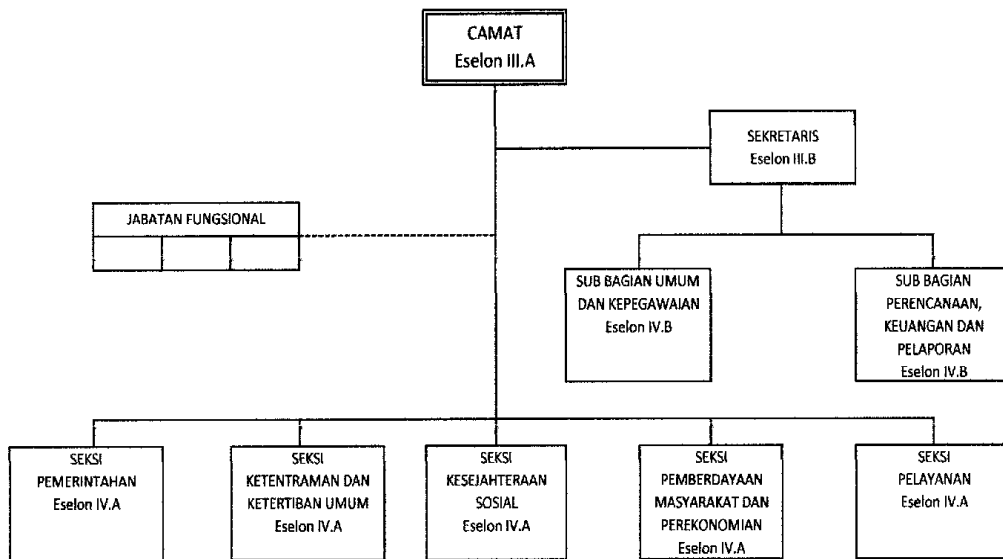
- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan;

### Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 40 TAHUN 2017  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN  
TUGAS DAN TATA KERJA KECAMATAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PESISIR SELATAN

#### STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Basa Ampek balai Tapan

### 2.1.2.Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumberdaya merupakan elemen terpenting yang dibutuhkan suatu organisasi dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan. Sumberdaya Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

#### a. Sumberdaya Manusia

Susunan SDM-PNS Kecamatan SBasa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan per 30 April 2025 sebanyak 13 orang, berdasarkan jenjang pendidikan, SDM Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 2.3**  
**Komposisi SDM-PNS Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025**

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
S3	0	0.00%
S2	4	36,00%
D4/S1	7	64,00%
D3	0	0.00%
D2	0	0.00%
D1	0	0.00%
SLTA	0	0.00%
SMP	0	0.00%
SD	0	0.00%
<b>JUMLAH</b>	<b>11</b>	<b>100.00%</b>

Sumber : BEZETING Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

Komposisi SDM-PNS Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan menurut golongan, dapat ditunjukkan pada tabel 2.4 berikut ini:

**Tabel 2.4**  
**Komposisi SDM-PNS Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Berdasarkan Golongan**

NO.	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1	IV	3
2	III	8
3	II	0
4	I	0
<b>J U M L A H</b>		<b>11</b>

Sumber : DUK Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

b. **Sumber Daya Asset/Modal**

Sarana prasarana pada Perangkat Daerah Kecamatan SBasa Ampek Balai Tapan tercatat dalam bentuk kekayaan/asset tetap berupa tanah, bangunan gedung, mesin dan peralatan sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Sarana dan Prasarana

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Kantor Kecamatan	1	Baik
2	Rumah Dinas	1	Baik
3	Kendaraan Dinas Roda 4	1	Baik
4	Kendaraan Dinas Roda 2	3	Baik
5	Sound System	1	Baik



6	Wireless/ Sound System	1	Baik
7	Laptop	7	Baik
8	Komputer	2	Baik
9	Printer	7	Baik
10	AC	7	Baik
11	Lemari	6	Baik
12	Kursi Stainlis	50	Baik
13	Meja	14	Baik
14	Televisi	1	Baik
15	Projektor	1	Baik
16	Tempat Tidur	2	Baik
17	Lemari piring	1	Baik
18	Meja Resepsionis	1	Baik
19	Meja TV	1	Baik
20	Kipas Angin	3	Baik
21	Westafel	1	Baik
22	Mimbar Podium	1	Baik
23	Rak arsip	4	Baik

### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan kecamatan dapat diukur dari ketercapaian misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi:

1. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada.
2. Tersedianya aparatur yang berkualitas.
3. Tersedianya sarana trantib.
4. Adanya kesadaran terhadap pentingnya trantib.
5. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi.
6. Tersedianya data umum yang akurat.
7. Tersedianya data tata ruang yang terinci dalam bidang perdagangan.
8. Tersedianya tenaga aparat yang menguasai informasi perdagangan.
9. Tersedianya tenaga ahli di bidang kewirausahaan.
10. Tersedia bantuan dan akses permodalan.
11. Tersedianya data wajib pajak yang lengkap

Dalam usaha mencapai sasaran Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan kebijakan yang



dijabarkan dalam 6 (enam) program. Keberhasilan kinerja Kecamatan Basapek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari kondisi 5 (lima) tahun terakhir, data pencapaian kinerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2021-2025**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah				BB (74,00)	74,00 (BB)	74 (BB)	BB (74,00)	BB (75,00)	A (84,79)	BB (73,83)	BB (74,21)	BB (74,12)	-	114,58	99,77	100,28	100,28	-
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				80	80	85	85	86	80	80	85,25	85,25	-	100	100	100,26	100,26	-
3.	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan				1	1	1	75	89	1	1	1	87	-	100	100	100	116,00	-
4.	Persentase Nagari yang Memiliki Administrasi Baik				70%	70%	75%	75%	100%	70	70	75	100%	-	100	100	100	113,33	-
5.	Angka Kemiskinan Ekstrim				-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	-	-	-	-	100,00	-
6.	Prevalensi Stunting (EPPGBM)				-	-	-	1,74 %	2,5 %	-	-	-	2,92 %	-	-	-	-	32,18	-
7.	Persentase Konflik yang Diselesaikan				-	-	-	80%	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	125,00	-

Adapun untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2021-2025 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.7  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan  
Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2025

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- ( 000,- )					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- ( 000,-)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.572.579.935</b>	<b>1.679.018.675</b>	<b>1.545.934.269</b>	<b>2.338.387.175</b>	<b>1.724.926.766</b>	<b>1.436.406.328</b>	<b>1.671.777.720</b>	<b>1.496.647.787</b>	<b>1.955.134.073</b>	-	<b>91,34</b>	<b>99,57</b>	<b>96,81</b>	<b>83,61</b>	-	<b>22,32</b>	
<b>I</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.553.874.735</b>	<b>1.645.422.675</b>	<b>1.534.929.117</b>	<b>2.319.156.758</b>	<b>1.723.277.886</b>	<b>1.418.106.328</b>	<b>1.638.237.720</b>	<b>1.485.687.787</b>	<b>1.936.334.073</b>	-	<b>91,26</b>	<b>99,56</b>	<b>96,79</b>	<b>83,49</b>	-	<b>6,14</b>	
1	Belanja Pegawai	1.155.184.895	1.190.365.268	1.253.574.269	1.597.727.174	1.274.670.016	1.025.945.680	1.189.324.373	1.206.514.970	1.327.414.296	-	88,81	99,91	96,25	83,08	-	5,47	
2	Belanja Barang dan Jasa	398.689.840	455.057.407	281.354.848	721.429.584	448.607.870	392.160.648	448.913.347	279.172.817	608.919.777	-	98,36	98,65	99,22	84,40	-	23,64	
<b>II</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>18.705.200</b>	<b>33.596.000</b>	<b>11.005.152</b>	<b>19.230.417</b>	<b>19.648.880</b>	<b>18.300.000</b>	<b>33.540.000</b>	<b>10.960.000</b>	<b>18.800.000</b>	-	<b>97,83</b>	<b>99,83</b>	<b>99,59</b>	<b>97,76</b>	-	<b>22,32</b>	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.705.200	33.596.000	11.005.152	19.230.417	19.648.880	18.300.000	33.540.000	10.960.000	18.800.000	-	97,83	99,83	99,59	97,76	-	22,32	

Sumber: LRA 13 Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tahun 2021-2025

Hal-hal yang menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan antara lain :

- a. Optimalisasi pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor disetiap tupoksi pemerintahan, ekonomi pembangunan, kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya etos kerja, terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan serta perencanaan yang belu tepat sasaran.
- b. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati tidak seluruhnya bisa dijabarkan oleh Camat selaku pelaksana kebijakan. Seluruh rincian kewenangan yang belum dilaksanakan tidak disertai dengan Standar Operasional Prosedur/ petunjuk pelaksanaan dan pembagian tugas yang jelas sehingga sulit menafsirkan pada tahap implementasinya.
- c. Pelimpahan sebagian kewenangan belum diikuti dengan distribusi sumberdaya organisasi baik dari aspek sumberdaya aparatur pelaksana, sarana prasarana maupun dukungan pembiayaan yang memadai.
- d. Sinkronisasi terhadap beberapa kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat belum terlaksana dengan baik dengan kewenangan yang dimiliki OPD kabupaten, sehingga mengakibatkan adanya tumpang tindih kewenangan antara Camat dan OPD kabupaten.
- e. Dukungan lingkungan baik internal organisasi perangkat daerah maupun dari masyarakat sebagai objek kewenangan masih relatif rendah.

### **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja. Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komperhensif untuk memperoleh hasil yang optimal.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni:

### **1. Analisis Lingkungan Internal**

#### **a. Kekuatan (Strengths)**

- 1) Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Basa Ampek Balasi Tapan
- 2) Tercipta hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat;
- 3) Tersedianya jumlah SDM
- 4) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 5) Potensi penerimaan PBB-P2 yang terus meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 6) Tersedianya fasilitas pelayanan terpadu sehingga memudahkan pelayanan kepada masyarakat
- 7) Komitmen internal aparatur Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

#### **b. Kelemahan (Weakness)**

- 1) Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan .
- 2) Jarak yang jauh dari Ibu kota kabupaten sejauh  $\pm$  140 km sehingga menjadi kendala dalam transportasi maupun ketepatan waktu dalam penyampaian laporan dan kepentingan lainnya.
- 3) Sarana dan prasarana kantor belum memadai.
- 4) Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan nagari dalam menjalankan tugas dan fungsinyamasing-masing;

- 5) Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan nagari sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
- 6) Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan dan Nagari;
- 7) Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur nagari tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

## 2. Analisis Lingkungan Eksternal

### a. Peluang (Opportunities)

- 1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah tertata dengan baik;
- 2) Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- 3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- 4) Kerjasama wilayah perbatasan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya.
- 5) Potensi produk unggulan nagari dan potensi kawasan pinggir hutan yang semakin berkembang.
- 6) Terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.
- 7) Pengembangan perekonomian disektor peternakan, pertanian, perkebunan dan pariwisata.

### b. Ancaman (Threats)

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- 3) Kemungkinan adanya konflik perbatasan antar Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.
- 4) Permasalahan Trantibum dan pertanahan yang memerlukan penyelesaian dengan tepat.
- 5) Keamanan dan Ketertiban.

---

---

6) Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan, dll)

#### 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan adalah seluruh pihak yang mendapatkan manfaat atau pelayanan dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, baik itu internal Kecamatan (pegawai, perangkat desa/kelurahan) maupun eksternal (masyarakat umum, organisasi masyarakat, dll).

Lebih detail, kelompok sasaran layanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan meliputi:

- **Internal Kecamatan:** Pegawai kecamatan, perangkat desa/kelurahan, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam operasional kecamatan.
- **Masyarakat Umum:** Penduduk yang tinggal di wilayah kecamatan, yang menjadi penerima manfaat langsung dari program dan pelayanan kecamatan.
- **Organisasi Masyarakat:** Lembaga non-profit, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok lain yang berperan aktif dalam pembangunan dan pelayanan di tingkat kecamatan.
- **Lain-lain:** Pemangku kepentingan lain yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kecamatan, seperti pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan.

Dengan kata lain, kelompok sasaran layanan kecamatan mencakup semua pihak yang berkepentingan dan mendapatkan manfaat dari berbagai program, kegiatan, dan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan;
- b) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- c) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.
2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.  
Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:
  - a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
  - b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
  - c) Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
  - d) Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
  - e) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;
  - f) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.
3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.  
Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:
  - a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
  - b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
  - c) Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu;
  - d) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan;
  - e) Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes;
  - f) Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.8**  
**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan	Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belum sesuai
		Masih rendahnya tingkat poskamling dan Linmas aktif	
2.	Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan	Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi dan aktif di desa	Belum aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, Karang Taruna, Posyandu) di Kecamatan
		Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	Belum optimalnya penyaluran rastra, PKH, bantuan keagamaan kepada masyarakat Nagari
		Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	
		Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang Nagari dan kecamatan
3.	Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan yang terlayani
		Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perijinan tepat waktu	
		Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan	Belum maksimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan
		Belum optimalnya Realisasi Capaian RKP Nagari	Belum optimalnya laporan keuangan Nagari yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan
		Belum semua Nagari yang administrasi pengelolaan keuangannya baik	

**2.2.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

**Visi**

Visi merupakan gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam periode lima tahun ke depan. Visi ini dirumuskan berdasarkan potensi daerah, permasalahan yang dihadapi, serta harapan masyarakat terhadap kemajuan daerah. Berdasarkan hasil kajian dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, maka Visi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ini adalah :

## “Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”

Visi ini mencerminkan tekad Pemerintah Daerah dalam membangun wilayah yang memiliki daya saing tinggi, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut :

### **Maju:**

Mengacu pada pembangunan yang progresif di berbagai sektor yang berarti Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang modern, pelayanan publik yang prima, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kemajuan juga mencakup peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan teknologi guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

### **Tumbuh:**

Mencerminkan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, progresif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, “tumbuh” bukan hanya sekadar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan adanya perubahan yang positif, berkesinambungan, serta mampu menjawab tantangan zaman demi mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

### **Berkelanjutan:**

Menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mengembangkan energi terbarukan, serta menerapkan kebijakan ramah lingkungan, Pesisir Selatan berupaya memastikan bahwa kemajuan yang dicapai hari ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

### Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih mengusung 5 (lima) misi pembangunan yang ditawarkan kepada masyarakat yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, dan Berakhlak.
3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Masyarakat yang Sejahtera.
4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif.
5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana.

Dalam Penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terdapat 5 program Pro Rakyat yang menjadi janji politik Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan selama pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. Program Pro Rakyat tersebut merupakan program yang menyentuh langsung atas persoalan ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat, selengkapnya digambarkan sebagai berikut:

1. **Nagari Kanyang** : Memperkuat basis agrikultur/pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan
2. **Nagari Pandai** : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
3. **Nagari Mengaji** : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai religius dan budaya berlandaskan ABS-SBK
4. **Nagari Sehat** : Meningkatkan akses layanan kesehatan yang layak, serta perwujudan perilaku hidup yang bersih dan sehat
5. **Nagari Sejahtera** : Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat didukung infrastruktur yang memadai

Rangkuman singkat visi, misi dan 5 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2025–2029 di atas dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan dapat dinyatakan bahwa dengan mengoptimalkan peran dan fungsi kecamatan maka secara signifikan akan memberikan daya ungkit yang sangat kuat percepatan pelaksanaan 5 prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan.

Diantaranya dapat dijelaskan bahwa salah satu prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan adalah Mewujudkan Pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010. Artinya dengan mengoptimalkan pelaksanaan PATEN di Kecamatan dapat dipastikan bahwa salah satu prioritas pembangunan ini secara nyata akan terlaksana dan manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat .

Secara umum dapat dikemukakan bahwa 5 prioritas pembangunan tersebut, memiliki keterkaitan yang erat dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan. Oleh karena itu untuk menciptakan akselerasi dalam pencapaian pelaksanaan 5 prioritas pembangunan itu diperlukan penguatan peran dan fungsi PD Kecamatan dengan mengalokasikan sumberdaya yang proporsional sesuai dengan relevansi tugas pokok dan fungsi PD dengan 5 prioritas pembangunan. Sehingga akselerasi pembangunan benar-benar dapat terlaksana dan berimplikasi terhadap percepatan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan selama lima tahun ke depan.

### **2.2.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan antara lain:

- 1) Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya penambahan perangkat komputer;
- 2) Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, sehingga banyak tenaga yang

merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;

- 3) Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait;

#### **2.2.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS antara lain:

- 1) Faktor penghambat: Tidak mengetahui secara pasti peta RT/RW di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan (batas tata ruang kawasan);
- 2) Faktor Pendorong: Adanya kesempatan untuk pemanfaatan areal yang berada di kawasan hutan untuk kesejahteraan masyarakat disekitar pinggir kawasan hutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

#### **2.2.5. Isu Strategis**

Berdasar identifikasi permasalahan di atas maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;
2. Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas;
3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

---

---

**BAB III****TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2025-2029**

Adapun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Tujuan**

Merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan tujuan jangka menengah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 adalah Merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, adapun tujuan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan adalah **“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi.”**

**Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, sasaran yang akan dicapai Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan.
2. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan.
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.
4. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan. Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat.

Secara terperinci, tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan  
Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan
	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 7 (tujuh) indikator.

Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah  
Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai AKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.	Persentase Nagari Yang Memiliki Tata Kelola Pemerintah Yang Baik.
	Angka Kemiskinan Ekstrim.
	Prevalensi Stunting (EPPGBM)
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat KecamatanMeningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan

**Tabel 3.3**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				Pada Tahun Ke-				
(1)	(2)	(3)	(4)	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (71,00)	BB (72,00)	BB (73,00)	BB (74,00)	A (74,00)
		Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	88	88	90	90
			Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	89	90	90	90	90
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.	Persentase Nagari Yang Memiliki Tata Kelola Pemerintah Yang Baik.	100%	100%	100%	100%	100%
			Angka Kemiskinan Ekstrim	0%	0%	0%	0%	0%
			Prevalensi Stunting (EPPGBM)	2,5 %	2,5 %	2,5%	2,5%	2,5%
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat								

**Tabel 3.4**  
**Matrik Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2025-2029**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
					2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)		(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi	Persentase capaian kinerja Kecamatan Nilai PDRB (ADHK)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (71,00)	BB (72,00)	BB (73,00)	BB (74,00)	A (74,00)	A (74,00)
			Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	88	88	90	90	90
			Meningkatnya Inovasi Kecamatan	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	89	90	90	90	90	90
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.	Persentase Nagari Yang Memiliki Tata Kelola Pemerintah Yang Baik.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Angka Kemiskinan Ekstrim	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				Prevalensi Stunting (EPPGBM)	2,5 %	2,5 %	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat KecamatanMeningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### **3.2. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029**

Strategi adalah cara-cara yang dipakai oleh Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan program-program yang telah memperoleh pendanaan dari sumber APBD.

Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan.
2. Memperdekat pelayanan publik kepada masyarakat
3. Menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi.
5. Meningkatkan produk unggulan Daerah.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban

### **3.3. Arah Kebijakan Perangkat daerah Dalam Mencapai Yujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029**

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

7. Menyediakan infrastruktur pelayanan yang memadai.
8. Mengoptimalkan penerapan regulasi keterbukaan dan pelayanan informasi publik.
9. Membangun sistem layanan informasi publik yang transparan dan berkualitas.
10. Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan berbasis *egovernmen*.
11. Menggunakan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan.
12. Meningkatkan manajemen kinerja instansi pemerintahan.
13. Menzonasi pengembangan komoditi unggulan
14. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan.
15. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan.
16. Memperluas pangsa pasar produk unggulan.
17. Memperkuat peran siskamling.
18. Memperkuat peran pemangku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja.

Tabel 3.5

Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan berbasis <i>Egovernmen</i>	
				Menggunakan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan	
				Meningkatkan manajemen kinerja instansi pemerintahan	
				Meningkatkan kesejahteraan, memberikan reward dan punishment terhadap kinerja Aparatur	
		Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan	Menyediakan infrastruktur pelayanan yang memadai	
				Memperdekat pelayanan publik kepada masyarakat	Mengupayakan pemekaran nagari, kecamatan dan kabupaten
				Menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel	1 Mengoptimalkan penerapan regulasi keterbukaan dan pelayanan informasi publik 2 Membangun sistem layanan informasi publik yang transparan dan berkualitas
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.		3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan	
				4. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan	
				5. Memperluas pangsa pasar produk unggulan	
Meningkatnya Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat KecamatanMeningkatnya Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban	6. Memperkuat peran Siskamling			
		7. Memperkuat peran pemangku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja			

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kecamatan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat perundang-undangan yang berlaku, khususnya menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Oleh sebab itu, program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif disertai target kinerja terukur yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Kebutuhan pendanaan dalam Rencana Strategis bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun, sehingga kebutuhan pendanaan dapat berubah setiap tahun rencana berjalan.

Uraian rencana program dan target kinerja yang disertai dengan pendanaan indikatif bidang urusan kewilayahan pemerintahan kecamatan Tahun 2025-2029 merujuk pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Program-program yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan pada periode **2025-2029, dapat dilihat pada table berikut ini.**

Tabel. 4.1

**RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>URUSAN X.XX</b>			100	2.458.187.175,-	100	1.874.670.016,-	100	1.897.976.016,	100	1.961.000.0000	100	1.979.000.0000	100	1.961.000.0000	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>			100	2.458.187.175,-	100	1.874.670.016,-	100	1.672.976.016,	100	1.736.000.0000	100	1.754.000.0000	100	1.736.000.0000	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	%	100	1.558.077.539,-	100	1.736.000.000,	100	1.672.976.016,	100	1.736.000.000,	100	1.754.000.0000	100	1.736.000.0000	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	100	18.797.875,	59	18.150.875	49	10.000.000	59	14.000.000,-	59	14.000.000,-		14.000.000	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	9.080.850,00	6	8.379.850	6	5.000.000,	6	7.000.000,	6	7.000.000,	6	7.000.000,	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	53	9.717.025,00	53	9.771.025	53	5.000.000,	53	7.000.000,	53	7.000.000,	53	7.000.000,	

7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%	100	1.749.427.174	100	1.337.976.016	100	<b>1.337.976.016</b>	100	<b>1.364.000.000</b>	100	<b>1.364.000.000</b>	100	<b>1.364.000.000</b>
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	168	1.683.187.174,	168	1.274.670.016	168	1.274.526.016,00	168	1.300.000.000	168	1.300.000.000,	168	1.300.000.000,00
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dok	168	66.240.000,	168	40.200.000	168	63.450.000,00	168	64.000.000,	168	64.000.000,	168	64.000.000,00
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	245.025.263	100	214.206.760	100	198.000.000,00	100	212.000.000,00	100	230.000.000,00	100	212.000.000,00
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	pkt	6	3.385.735,	6	3.156.615	6	3.000.000,00	6	3.000.000,00	6	3.000.000,00	6	3.000.000,00
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	pkt	6	5000000	6	-	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	pkt	-	-	-	-	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	pkt					12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	pkt	12	12.412.600	12	9.774.645	12	6.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	lap	12	7.700.000	12	4.950.000	12	3.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap	12	217.916.000	12	196.325.500	12	150.000.000,00	12	161.000.000,00	12	176.000.000,00	12	161.000.000,00



Kecamatan Basa Ampek Balai

7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dok	-	-	-	-	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	34.726.735	100	12.000.000,-	100	18.000.000,-00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,0000	100	15.000.000,00
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Pkt	3	6.660.000,	3	12.000.000	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	unit	5	28.126.735,	-	-	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	unit	-	-	-	-	1	8.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	80.395.000,00	20	80.395.000	20	8.500.000,00	20	8.500.000,00	20	8.500.000,00	20	8.500.000,00
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Lap	12	8.395.000	12	8.395.000	12	8.500.000,00	12	8.500.000,00	12	8.500.000,00	12	8.500.000,00
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Lap	12	72.000.000,	12	72.000.000	12	48.000.000,00	12	48.000.000,00	12	48.000.000,00	12	48.000.000,00
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik		100	95.348.128	100	59.088.786	100	38.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	4	38.348.128,	4	38.388.786	4	38.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00



Kecamatan Basa Ampek Balai

Tahun

7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	unit					3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	unit	9	3.800.000,00	9	3.800.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	unit	2	50.050.000,00	2	12.400.000,00	2	3.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	unit	5	3.150.000,00	5	4.500.000,00	5	1.500.000,00	5	4.500.000,00	5	4.500.000,00	5	4.500.000,00	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kewilayahan		85	13.484.000,00	86	10.678.000,00	88	40.000.000,00	90	40.000.000,00	90	40.000.000,00	90	40.000.000,00	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		104	13.484.000,00	104	10.678.000,00	104	40.000.000,00	104	40.000.000,00	104	40.000.000,00	104	40.000.000,00	
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	lap	100	5.956.000,00	100	3.150.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	lap	4	7.528.000,00	4	7.528.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase nagari/desa dengan Kategori Minimal Maju		100	96.646.000,00	100	73.746.000,00	100	50.000.000,00	100	51.000.000,00	100	50.000.000,00	100	52.000.000,00	



Kecamatan Basa Ampek Balai

7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan		100	96.646.000		73.746.000	100	50.000.000,00	100	51.000.000,00	100	50.000.000,00	100	52.000.000,00	
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	lap	10	3.596.000			10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	12.000.000,00	10	12.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	lap	12	93.050.000,	12	73.746.000	10	35.000.000,00	10	36.000.000,00	10	38.000.000,00	10	40.000.000,00	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju						100	5.000.000,00	100	4.000.000,00	100	5.000.000,00	100	3.000.000,00	
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	keluarga					20	2.000.000,-	20	2.000.000,-	20	2.000.000,-	20	2.000.000,-	
7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	Keluarga	-				20	3.000.000,	20	2.000.000,00	20	3.000.000,	20	2.000.000,	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum		80	12.080.000	100	12.300.000	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,	100	20.000.000,00	



Kecamatan Basa Ampek Balai

7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase fasilitasi dan kordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti		80	12.080.000	100	12.300.000	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	lap	4	12.080.000,	4	12.300.000	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum		100	22.950.000	100	22.950.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti		100	22.950.000	100	22.950.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000
7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	orang	100	22.950.000	100	22.950.000	200	70.000.000,00	200	70.000.000,00	200	70.000.000,00	200	70.000.000,00
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase administrasi keuangan dan administrasi nagari yang dilaksanakan sesuai standar		100	41.650.001	100	19.977.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi (nagari)		10	41.650.001	10	19.977.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	lap	10	41.650.001	10	19.977.000	10	40.000.000,	10	40.000.000,	10	40.000.000,	10	40.000.000,

#### 4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Kinerja merupakan gambaran kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang dikuatifikasi melalui indikator kinerja. Berlandaskan perspektif tersebut, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diukur melalui Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Penentuan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 didasari atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021-2024, SPM serta memperhatikan target indikator kinerja prioritas RPJMD 2025-2029 Kabupaten Pesisir Selatan, merujuk kepada *baseline* tahun 2024 dan berpedoman kepada target tahun 2030 yang terdapat dalam RPJPD Tahun 2025-2045 sekaligus sebagai tahun transisi serta menjadi kinerja bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya dan pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2030, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan  
Penetapan target indikator IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Basa Ampek  
Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator	Satuan	Baseline (2024)	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	BB (70,12)	BB (71,00)	BB (72,00)	BB (73,00)	BB (74,00)	BB (74,00)	BB (74,00)	
Indeks Kepuasan Masyarakat at (IKM)	Nilai	85	86	88	90	90	90	90	
Nilai Kematangan Inovasi	Nilai	75	89	89	90	90	90	90	
Persentase Nagari Yang Memiliki Tata Kelola	%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Prevalensi Stunting (EPPGBM)	%	1,74 %	2,5 %	2,5 %	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	
Persentase Konflik Yang Diselesaikan	%	80 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

## BAB V

### **P E N U T U P**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 disusun sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, berisi tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun, merupakan pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Rencana Stategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan ini sangat ditentukan oleh dukungan banyak pihak, termasuk didalamnya masyarakat, pihak swasta dan kemitraan, aparaturnya Kecamatan mulai dari pengelola keuangan sampai dengan pelaksana teknis kegiatan.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan ini diharapkan rencana pembangunan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan pada akhirnya Visi Kabupaten Pesisir Selatan dapat terwujud.

## LAMPIRAN DATA SIPD

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	
<b>7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN</b>												
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi			Persentase Capaian Kinerja (%)	0	100	100	100	100	100	100		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	70,12	71,00	72,00	73,00	74,00	74,00	74,00	
			Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka)	8,500	8,600	8,800	8,800	90	90	90	
				Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	75	89	90	90	90	90	90	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari yang Memiliki Administrasi Baik (%)	75	100	100	100	100	100	100	
				Angka Kemiskinan Ekstrem (%)	0	0	0	0	0	0	0	
				Prevalensi Stunting (EPPGBM) (%)	1,74	2,5	25	25	25	25	25	
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang Diselesaikan (%)	80	100	100	100	100	100	100				

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					1.897.976.016,00		1.961.000.000,00		1.979.000.000,00		1.961.000.000,00		1.987.500.000,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.672.976.016,00		1.736.000.000,00		1.754.000.000,00		1.736.000.000,00		1.762.500.000,00	
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah					1.672.976.016,00		1.736.000.000,00		1.754.000.000,00		1.736.000.000,00		1.762.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kewilayahan					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Inovasi Perangkat Daerah					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00	
Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju					55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	
Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum					70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan

7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Persentase administrasi keuangan dan administrasi nagari yang dilaksanakan sesuai standar					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					1897976016.00		1961000000.00		1979000000.00		1961000000.00		1987500000.00	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
<b>7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN</b>								
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan			Persentase Capaian Kinerja (%)			
					Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)			
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			



					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	



					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah yang kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kewilayahan		7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju		7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	



					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
				Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum		7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	



				Persentase fasilitasi dan kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum		7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
				Persentase administrasi keuangan dan administrasi nagari yang dilaksanakan sesuai standar		7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi (nagari)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka)		
					Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)		
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah		7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	



					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kewilayahan			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	



			Meningkatnya Inovasi Perangkat Daerah			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Meningkatnya Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penuhunan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	



					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
			Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase fasilitasi dan kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
			Persentase administrasi keuangan dan administrasi nagari yang dilaksanakan			7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	



			sesuai standar	Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi (nagari)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari			Persentase Nagari yang Memiliki Administrasi Baik (%)			
					Angka Kemiskinan Ekstrim (%)			
						Prevalensi Stunting (EPPGBM) (%)		
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Persentase Tertib Administrasi Keuangan		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kewilayahan		7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju		7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	



					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
			Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase fasilitasi dan kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	



					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
			Persentase administrasi keuangan dan administrasi nagari yang dilaksanakan sesuai standar			7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi (nagari)		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan			Persentase Konflik yang Diselesaikan (%)		
		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah				7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Persentase Tertib Administrasi Keuangan			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	



					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaa Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaa Mebel		
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
				Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		



				Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kewilayahan		7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
			Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju		7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa



				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
			Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum		7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	



			Persentase fasilitasi dan kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum		7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
			Persentase administrasi keuangan dan administrasi nagari yang dilaksanakan sesuai standar		7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi (nagari)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	



TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 – KECAMATAN				1.897.976.016,00		1.961.000.000,00		1.979.000.000,00		1.961.000.000,00		1.987.500.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.672.976.016,00		1.736.000.000,00		1.754.000.000,00		1.736.000.000,00		1.762.500.000,00		
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah				1.672.976.016,00		1.736.000.000,00		1.754.000.000,00		1.736.000.000,00		1.762.500.000,00	7.01.0.00.0.00.15.000 - KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		
Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	53	53	10.000.000,00	53	14.000.000,00	53	14.000.000,00	53	14.000.000,00	53	14.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	5.000.000,00	6	7.000.000,00	6	7.000.000,00	6	7.000.000,00	6	7.000.000,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	53	53	5.000.000,00	53	7.000.000,00	53	7.000.000,00	53	7.000.000,00	53	7.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.337.976.016,00		1.364.000.000,00		1.364.000.000,00		1.364.000.000,00		1.364.000.000,00		
Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	1.337.976.016,00	12	1.364.000.000,00	12	1.364.000.000,00	12	1.364.000.000,00	12	1.364.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	168	168		168		168		168		168			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.274.526.016,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	168	168	1.274.526.016,00	168	1.300.000.000,00	168	1.300.000.000,00	168	1.300.000.000,00	168	1.300.000.000,00		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				63.450.000,00		64.000.000,00		64.000.000,00		64.000.000,00		64.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	63.450.000,00	12	64.000.000,00	12	64.000.000,00	12	64.000.000,00	12	64.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				198.000.000,00		212.000.000,00		230.000.000,00		212.000.000,00		213.500.000,00		
Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	198.000.000,00	6	212.000.000,00	6	230.000.000,00	6	212.000.000,00	6	213.500.000,00		



Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan

	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6		6		6		6		6		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	1		1		1		1		1		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	3.000.000,00	6	3.000.000,00	6	3.000.000,00	6	3.000.000,00	6	3.000.000,00	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000,00		5.000.000,00		8.000.000,00		5.000.000,00		6.500.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	8.000.000,00	6	5.000.000,00	6	6.500.000,00	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	6.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				3.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	3.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000,00		161.000.000,00		176.000.000,00		161.000.000,00		161.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	150.000.000,00	12	161.000.000,00	12	176.000.000,00	12	161.000.000,00	12	161.000.000,00	
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	





### Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan

7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				18.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		40.000.000,00		
Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	2	18.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	40.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	-		-		-		-		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		25.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	25.000.000,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	8.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				56.500.000,00		56.500.000,00		56.500.000,00		56.500.000,00		56.500.000,00		
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	56.500.000,00	12	56.500.000,00	12	56.500.000,00	12	56.500.000,00	12	56.500.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	8.500.000,00	12	8.500.000,00	12	8.500.000,00	12	8.500.000,00	12	8.500.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				48.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	48.000.000,00	12	48.000.000,00	12	48.000.000,00	12	48.000.000,00	12	48.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				52.500.000,00		74.500.000,00		74.500.000,00		74.500.000,00		74.500.000,00		
Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	3	52.500.000,00	3	74.500.000,00	3	74.500.000,00	3	74.500.000,00	3	74.500.000,00		



*Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan*

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5		5		5		5		5			
---	---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--



Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan

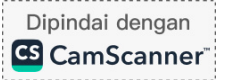
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	9	5		5		5		5		5			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				38.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	4	38.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	9	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	3.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	1.500.000,00	5	4.500.000,00	5	4.500.000,00	5	4.500.000,00	5	4.500.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kewilayahan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.15.00 00 - KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	100	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	100	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00		
Meningkatnya Inovasi Perangkat Daerah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		





Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan

7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	4	4		20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	4		20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju				55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00	7.01.000.000.15.00	00 - KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				50.000.000,00		51.000.000,00		50.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00		
Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	10	10	50.000.000,00	10	51.000.000,00	10	50.000.000,00	10	52.000.000,00	10	52.000.000,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10	10											
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				15.000.000,00		15.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	10		15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	12.000.000,00	10	12.000.000,00	10	12.000.000,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				35.000.000,00		36.000.000,00		38.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	10		35.000.000,00	10	36.000.000,00	10	38.000.000,00	10	40.000.000,00	10	40.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				5.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju	10	20		5.000.000,00	20	4.000.000,00	20	5.000.000,00	20	3.000.000,00	20	3.000.000,00		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	10	20											
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	10	20		20		20		20		20			





Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan

7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tertaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	10	20	2.000.000,00	20	2.000.000,00	20	2.000.000,00	20	1.000.000,00	20	1.000.000,00		
7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				3.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tertaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	10	20	3.000.000,00	20	2.000.000,00	20	3.000.000,00	20	2.000.000,00	20	2.000.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.15.00 00 - KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Persentase fasilitasi dan kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tertaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	7.01.0.00.0.00.15.00 00 - KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	200	200	70.000.000,00	200	70.000.000,00	200	70.000.000,00	200	70.000.000,00	200	70.000.000,00		
7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		





**Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan**

Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	200	200	70.000.000,00	200	70.000.000,00	200	70.000.000,00	200	70.000.000,00	200	70.000.000,00			
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00			
Persentase administrasi keuangan dan administrasi nagari yang dilaksanakan sesuai standar				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	7.01.0.00.0.00.15.00 00 - KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN		
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00			
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00			
Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi (nagari)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	10	10	40.000.000,00	10	40.000.000,00		40.000.000,00	10	40.000.000,00	10	40.000.000,00			
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00			
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	10	10	40.000.000,00	10	40.000.000,00	10	40.000.000,00	10	40.000.000,00	10	40.000.000,00			



**TABEL 4.4. DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN  
AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN									
2.	Persentase Nagari yang Memiliki Administrasi Baik	%	75	100	100	100	100	100	100	
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	70,12	71,00	72,00	73,00	74,00	74,00	74,00	
4.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Angka	75	89	90	90	90	90	90	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	8.500	8.600	8.800	8.800	90	90	90	
6.	Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	%	1,74	2,5	25	25	25	25	25	
8.	Persentase Konflik yang Diselesaikan	%	80	100	100	100	100	100	100	